

PENGARUH E-GOVERNMENT TERHADAP EFISIENSI BIROKRASI DI INDONESIA

Disusun guna untuk memenuhi tugas kuliah

Metode Penelitian Administrasi Publik

(skripsi)

Oleh:

Adriligha Roma S

2256041049



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

DAFTAR ISI

BAB I	4
PENDAHULUAN	5
1. 1. Latar Belakang Masalah	5
1. 2. Perumusan Masalah	11
1. 3. Tujuan Penelitian	12
1. 4. Manfaat Penelitian.....	12
1. 5. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.2 E-Government dalam Birokrasi	15
2.2.1 Penerapan E-Government dalam Birokrasi di Indonesia.....	15
2.2.2 Indikator Pengembangan E-Government	16
2.3 Birokrasi	17
2.4 Penataan ulang system Birokrasi	18
2.5 Konsep Dasar Birokrasi	19
2.5.1 Definisi E-Government.....	19
2.6 Manfaat E-Government	20
2.7 Tantangan dalam Implementasi E-Government.....	21
2.8 Landasan Teori.....	22
2.9 Kerangka Pikir.....	23
III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Fokus Penelitian	25
3.3 Lokasi Penelitian.....	26
3.4 Jenis dan Sumber Penelitian	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6 Teknis Analisis Data	27
3.7 Teknik Keabsahan Data	28

IV. hasil dan Pembahasan	29
V. Kesimpulan dan Saran	31
SARAN.....	32
Daftar Pustaka	33

ABSTRACT

E-Government, or electronic government, has become one of the major innovations in modern government administration. This article aims to explore the influence of e-Government on bureaucracy. Bureaucracy is an integral part of government that is responsible for implementing public policies and services. With increasing digitalization and information technology in government, the influence of e-Government on bureaucracy can have a significant impact. e-Government has great potential to change and improve bureaucratic performance. Wise and sustainable application of this technology can lead to a bureaucracy that is more efficient, transparent and responsive to the needs of society. Further study and development of best practices in the use of e-Government in a bureaucratic context are needed to maximize its benefits in government administration.

Keywords : e-government, bureaucracy

ABSTRAK

E-Government, atau pemerintahan elektronik, telah menjadi salah satu inovasi utama dalam administrasi pemerintah modern. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh e-Government terhadap birokrasi. Birokrasi merupakan bagian integral dari pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan layanan publik. Dengan semakin meningkatnya digitalisasi dan teknologi informasi dalam pemerintahan, pengaruh e-Government terhadap birokrasi dapat memiliki dampak yang signifikan. , e-Government memiliki potensi besar untuk mengubah dan meningkatkan kinerja birokrasi. Penerapan yang bijak dan berkelanjutan dari teknologi ini dapat mengarah pada birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Studi lanjutan dan pengembangan praktik terbaik dalam penggunaan e-Government dalam konteks birokrasi diperlukan untuk memaksimalkan manfaatnya dalam administrasi pemerintahan.

Kata kunci : e-government, birokrasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah gerakan reformasi tahun 1998 mengguncang Indonesia, masyarakat Indonesia mulai menuntut pemerintahan yang lebih baik dan responsif daripada sebelumnya. Paradigma yang berkembang dalam pemerintahan negara ini berfokus pada penyediaan pelayanan yang lebih baik kepada rakyat dan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam urusan negara. Inilah awal mula munculnya konsep clean and good governance di Indonesia, yang bertujuan menciptakan kehidupan yang madani dan sesuai dengan era digitalisasi modern(Wirawan, 2020).

Clean and good governance adalah istilah yang merujuk pada praktik tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Prinsip-prinsip yang mendasari clean and good governance meliputi transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Konsep Good Governance dapat diartikan sebagai panduan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang efektif. Good Governance sebenarnya telah lama menjadi praktik umum oleh berbagai pihak, termasuk Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Namun, masih banyak yang memahami konsep Governance dengan cara yang keliru. Banyak yang mengartikan governance sebagai Tata Pemerintahan dalam konteks struktur dan manajemen lembaga eksekutif saja. Sebenarnya, pemerintah hanyalah salah satu dari tiga pilar utama yang membentuk governance, yang lainnya adalah sektor swasta dan masyarakat madani (civil society).

Oleh karena itu, memahami governance berarti memahami bagaimana ketiga aktor ini berkolaborasi dan berinteraksi dalam sebuah kerangka aturan yang disepakati bersama (Rosyid, 2).

Untuk mencapai clean and good governance, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi publik, perlu adanya langkah-langkah kebijakan yang terarah dalam perubahan sistem dan tata kelola pemerintahan. Salah satu sarana yang penting dalam mencapai tujuan ini adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), yang dikenal sebagai e-government atau Pemerintahan Elektronik. Penggunaan teknologi informasi saat ini telah menjadi esensial dalam berbagai aspek kehidupan. Ini mencakup penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, yang tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan (e-Business atau e-Commerce) tetapi juga merasuki berbagai sektor lain seperti pendidikan (e-Learning), jejaring sosial (social networking), perbankan (e-Banking), dan banyak lagi. Keberadaan teknologi informasi, terutama internet, membawa sejumlah besar manfaat bagi masyarakat. Salah satu manfaat utamanya adalah percepatan, kemudahan, dan efisiensi dalam penyebaran informasi dan komunikasi. Selain itu, teknologi ini mengatasi kendala jarak dan waktu, menghubungkan orang-orang dari berbagai lokasi geografis secara instan (Djauharie, 2016).

Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, teknologi informasi telah merasuki semua lapisan masyarakat, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah juga telah mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam layanan publik, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam era di mana informasi adalah kekuatan, teknologi informasi dan internet telah menjadi pendorong utama perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini agar dapat memanfaatkannya sebaik mungkin dalam berbagai aspek kehidupan kita. Teknologi informasi bukan hanya alat, tetapi juga sebuah sarana untuk mewujudkan potensi besar kita dalam menghadapi tantangan masa depan.

E-government memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Ini melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas layanan publik, serta memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, tujuan dari implementasi e-government adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap tindakan pemerintah.

Dalam era digitalisasi modern ini, clean and good governance melalui e-government bukan hanya menjadi suatu konsep, tetapi juga menjadi suatu keharusan dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat Indonesia dapat mengambil peran aktif dalam memastikan bahwa pemerintahan mereka berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip clean and good governance. E-Government, atau yang sering disebut juga sebagai Electronic Administration, merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan hubungannya dengan berbagai pihak dalam konteks good governance. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas. Baik E-Government maupun Electronic Administration memiliki fokus pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan (Muliawaty & Hendryawan, 2020)

E-government adalah sebuah kerangka kerja teknologi informasi yang diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian opsi kepada warga untuk lebih mudah mengakses informasi publik. Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan peningkatan efektivitas serta efisiensi dalam pelayanan publik, sangat penting adanya perumusan kebijakan dan strategi pengembangan e-government (Wirawan, 2020).

Menurut Rachel Silcock, E-Government adalah pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan ketersediaan dan pengiriman layanan pemerintah, dengan tujuan memberikan manfaat kepada warga negara, mitra bisnis, dan karyawan. Pendekatan E-Government terus

mendorong inovasi dan menciptakan mode layanan publik baru, di mana semua entitas publik dan instansi pemerintah bekerja sama untuk menyediakan layanan yang modern, terintegrasi, dan tidak terbatas bagi penduduknya. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah tidak lagi bersifat satu arah, melainkan membangun kemitraan antara pemerintah dan warga negara (Silcock, 2001).

Sementara itu, menurut Zhiyuan Fang, E-Government didefinisikan sebagai cara pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi inovatif, khususnya aplikasi berbasis web melalui internet, untuk memudahkan akses informasi dan layanan pemerintah bagi warga negara. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan institusi pemerintah dan proses demokrasi (Fang, 2002).

Sedangkan menurut Sumardi, E-government adalah salah satu aspek teknologi informasi yang memegang peran penting dalam transformasi pelayanan publik di Indonesia. Sebagai respons terhadap perubahan dan kemajuan teknologi informasi di tingkat global, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat sistem pemerintahan secara digital, dengan tujuan untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, baik saat ini maupun di masa depan. Langkah-langkah ini diawali dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government. Dalam dokumen ini, terdapat panduan tentang bagaimana e-government akan diimplementasikan dalam penyelenggaraan negara. Ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan e-government (Sumardi et al., 2021).

Umumnya, masyarakat menganggap bahwa e-government hanya sebatas pembuatan situs web oleh instansi pemerintah. Namun, sedikit yang menyadari bahwa evolusi penggunaan teknologi informasi dalam sektor publik dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan yang bervariasi dari masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh kompleksitas konsep

egovernment yang sulit dipahami, yang dapat dimaklumi mengingat tugas-tugas yang sangat beragam dalam pemerintahan dan kebutuhan yang berbeda di setiap daerah (Sumardi et al., n.d.).

Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government memberikan arahan kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan mereka dalam mendukung perkembangan e-Government di seluruh negeri. Ini mencerminkan kebutuhan untuk memajukan sistem pemerintahan elektronik guna meningkatkan efisiensi dan keterbukaan pemerintahan (Kurniasih, 2013).

Di samping itu, birokrasi seringkali mengalami tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan, dan memiliki reputasi yang tidak baik, terutama dalam konteks pelayanan publik sehari-hari, terutama di negara-negara berkembang yang mewarisi tradisi birokrasi yang cenderung korup dan tidak mendukung masyarakat yang seharusnya mereka layani. Selain itu, birokrasi sering dianggap sebagai sistem yang kaku dan formalistik, padahal tidak semua masalah dalam masyarakat dan pemerintahan dapat diatasi dengan pendekatan formal. Di era di mana teknologi dan inovasi semakin mendominasi masyarakat dan ekonomi, birokrasi di negara-negara berkembang harus menghadapi tuntutan baru, seperti meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat terhadap informasi yang tersedia dalam birokrasi. Selain itu, ada juga tuntutan untuk memberikan kepastian, rasa aman, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam interaksi dengan birokrasi (Sumardi, 2021).

Meskipun begitu, kemajuan dalam birokrasi Indonesia memang sudah mulai melupakan penyakit patrimonialismenya. Namun, perkembangannya belum memenuhi ekspektasi. Kepelikan dalam dunia demokrasi dan penerapan desentralisasi yang tidak efisien, secara signifikan telah berdampak pada kondisi birokrasi Indonesia saat ini. Kami belum sepenuhnya mencapai karakter birokrasi yang rasional dan independen dari kepentingan kelompok tertentu.

Untuk berharap agar birokrasi berjalan sesuai dengan yang ideal, masih memerlukan waktu yang cukup panjang (Firdaus et al., 2021).

Birokrasi di Indonesia perlu mengalami perbaikan menyeluruh di semua sektor pemerintahan agar dapat meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi harus mampu memenuhi kebutuhan dan harapan publik itu sendiri, dan hal ini sangat terkait dengan konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Birokrasi yang berarti adalah yang tidak sekadar menjalankan aspirasi internal pemerintah, tetapi juga menciptakan kebijakan yang responsif, inklusif, dan didasarkan pada kesepakatan bersama antara berbagai pemangku kepentingan.

Konsep ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Thoha (2007: 61), yang menekankan bahwa Good Governance memiliki dampak signifikan pada kualitas birokrasi. Paradigma baru ini menekankan peran manajer publik dalam memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dengan memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus menerapkan prinsip-transparansi, akuntabilitas, dan manajemen yang bersih serta bebas dari korupsi. Namun, saat ini, penyelenggaraan pelayanan publik masih menghadapi berbagai kendala yang belum mampu memenuhi kebutuhan dan perkembangan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, serta dalam konteks nasional. Pelayanan publik belum mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan, dan mutu layanan yang diberikan masih belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Tentu saja, hal ini juga dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan pelayanan publik dan faktor pendukung lainnya. Dengan semakin berkembangnya pelayanan pemerintah, muncul berbagai masalah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, seperti dalam pelayanan administrasi kependudukan atau penerbitan kartu tanda penduduk.

Informasi yang ditemukan baik secara langsung maupun melalui media massa seringkali mengungkapkan berbagai kelemahan dalam pelayanan pemerintah yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat. Kinerja birokrasi sering kali dianggap kurang profesional, lambat, berbelit-belit, menuntut imbalan, bersifat diskriminatif, kurang bersahabat, dan didukung oleh fasilitas pelayanan yang tidak memadai. Semua ini menciptakan fenomena dan isu yang

memperdalam kesenjangan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks pelayanan. Situasi ini menunjukkan bahwa kajian dan analisis mengenai pelayanan publik adalah hal yang sangat penting, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. (Rosyhid, 2019).

Efisiensi birokrasi merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga integritas pemerintahan dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Birokrasi yang efisien diharapkan dapat merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat, mengurangi biaya administrasi, dan meminimalkan praktik-praktik korupsi. Namun, dalam praktiknya, birokrasi di Indonesia sering kali ditemui dengan berbagai hambatan yang menghambat pencapaian efisiensi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, E-Government telah menjadi fokus perhatian dalam upaya reformasi birokrasi di Indonesia.

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik serta meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan implementasi EGovernment, diharapkan birokrasi dapat lebih efisien dalam mengelola berbagai proses administratif dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji dampak implementasi E-Government terhadap efisiensi birokrasi di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji dampak implementasi E-Government terhadap efisiensi birokrasi di Provinsi Lampung. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus tentang pengaruh E-Government terhadap efisiensi birokrasi di tingkat pemerintah daerah Provinsi Lampung, dan diharapkan dapat menjadi landasan penting bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mendukung transformasi digital pemerintahan di masa depan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tentang pengaruh E-Government terhadap efisiensi birokrasi di tingkat pemerintah penelitian ini dapat dirumuskan dengan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pengaruh implementasi E-Government terhadap efisiensi birokrasi di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi E-Government di Indonesia?
3. Bagaimana peran E-Government dalam mendukung upaya menciptakan clean and good governance di Indonesia?

1. 3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh E-Government terhadap efisiensi birokrasi di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh implementasi E-Government terhadap efisiensi birokrasi di Indonesia
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi E-Government di Indonesia
3. Untuk mengkaji peran E-Government dalam mendukung upaya menciptakan clean and good governance di Indonesia

1. 4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak, yaitu:

1. Manfaat Penelitian Bagi Akademisi Penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumbangan pengetahuan dalam bidang studi E-Government dan efisiensi birokrasi di tingkat pemerintah daerah. Hasil penelitian dapat digunakan untuk melengkapi literatur akademis dan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Penelitian Bagi Organisasi Sektor Publik Hasil penelitian dapat memberikan wawasan kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung tentang efektivitas implementasi E-Government dalam meningkatkan efisiensi birokrasi. Ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan sistem E-Government yang lebih baik. 3. Manfaat Penelitian Bagi Penulis Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang peran E-Government dalam pemerintahan modern. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah dan artikel terkait.

1. 5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki struktur penulisan yang terbagi menjadi lima bab. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab awal ini, akan dipresentasikan latar belakang permasalahan sebagai dasar penelitian, perumusan permasalahan yang sejalan dengan latar belakang, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan diakhiri dengan penjelasan mengenai tata urutan penulisan.

BAB II TEORI DAN KAJIAN LITERATUR Bab ini akan mendalami teori dan studi literatur sebagai landasan penelitian. Ini mencakup dasar teori, penelitian sebelumnya, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini, akan diuraikan langkah praktis pelaksanaan penelitian. Ini mencakup penguraian variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, metode pemilihan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta pendekatan analisis data yang diterapkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini akan memusatkan perhatian pada gambaran tentang objek penelitian, termasuk profil sampel yang digunakan, hasil analisis data, dan diskusi atas temuan penelitian.

BAB V PENUTUP Bab terakhir ini akan mengemukakan simpulan dari hasil penelitian, dengan mempertimbangkan keterbatasan penelitian yang ada. Tambahan pula, bab ini akan memberikan saran-saran untuk penelitian yang berpotensi dilakukan di masa yang akan datang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul yang peneliti ambil yaitu, “Analisi E-Government Terhadap Efisiensi Birokrasi” E-government memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Ini melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, serta memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, tujuan dari implementasi e-government adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap tindakan pemerintah.

E-government adalah sebuah kerangka kerja teknologi informasi yang diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian opsi kepada warga untuk lebih mudah mengakses informasi publik. Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan peningkatan efektivitas serta efisiensi dalam pelayanan publik, sangat penting adanya perumusan kebijakan dan strategi pengembangan e-government (Wirawan, 2020).

Di samping itu, birokrasi seringkali mengalami tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan, dan memiliki reputasi yang tidak baik, terutama dalam konteks pelayanan publik sehari-hari, terutama di negara-negara berkembang yang mewarisi tradisi birokrasi yang cenderung korup dan tidak mendukung masyarakat yang seharusnya mereka layani. Meskipun begitu, kemajuan dalam birokrasi Indonesia memang sudah mulai melupakan penyakit patrimonialismenya. Namun, perkembangannya belum memenuhi ekspektasi. Kepelikan dalam dunia demokrasi dan penerapan desentralisasi yang tidak efisien, secara signifikan telah berdampak pada kondisi birokrasi Indonesia saat ini.

Birokrasi di Indonesia perlu mengalami perbaikan menyeluruh di semua sektor pemerintahan agar dapat meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi harus mampu memenuhi kebutuhan dan harapan publik itu sendiri, dan hal ini sangat terkait dengan konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

2.2 E-Government Dalam Birokrasi

2.2.1 penerapan E-Government Dalam Birokrasi Di Indonesia

Pemerintah telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau electronic government (e-government) sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. Untuk mewujudkan tata kelola lebih baik, pemerintah melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) merumuskan payung hukum dalam penerapan e-government di Indonesia. E-Government, atau pemerintahan elektronik, adalah konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Di Indonesia, implementasi E-Government telah menjadi fokus dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Terdapat beberapa aspek E-Government dalam birokrasi Indonesia:

- 1. Portal Pemerintah:** Pemerintah Indonesia telah mengembangkan portal resmi yang memberikan akses ke berbagai layanan dan informasi pemerintah, seperti portal www.indonesia.go.id. Ini memungkinkan warga negara untuk mengakses informasi pemerintah dan layanan secara online.

- 2. Pelayanan Publik Online:** Banyak instansi pemerintah di Indonesia telah mengembangkan sistem pelayanan online, termasuk pembuatan paspor, perpanjangan SIM, dan pendaftaran pajak. Hal ini memudahkan warga untuk mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.

- 3. Sistem Informasi Manajemen Birokrasi:** Pemerintah telah mengembangkan sistem informasi untuk mendukung manajemen birokrasi, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur.

4. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja: E-Government juga digunakan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, termasuk melalui pengukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan-layanan yang disediakan.

5. E-Procurement: Pemerintah Indonesia telah mengadopsi E-Procurement untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini meningkatkan transparansi dan meminimalkan praktik korupsi

2.2.2 indikator pengembangan E-Government

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government (Indrajit, 2004), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah:

1) Support Elemen support adalah elemen paling penting dalam pengembangan e-government perlu dukungan atau yang disebut political will dari pejabat publik. Hal ini agar konsep e-government dapat diterapkan, tanpa adanya itu berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government dapat terlaksana.

2) Capacity Elemen capacity merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan e-government agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat tiga sumber daya yang harus dimiliki, yaitu:

a) Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-government.

b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan e-government.

c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan

2) Value Elemen value berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan e-government.

Dalam elemen value yang menentukan besar tidaknya manfaat e-government adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan.

2.3 Birokrasi

Birokrasi merujuk pada struktur organisasi dan proses administratif yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi lain untuk mengelola sumber daya, menerapkan kebijakan, dan menyediakan layanan. Ini adalah elemen penting dalam berbagai lembaga dan entitas di seluruh dunia, termasuk pemerintah, bisnis, organisasi nirlaba, dan sektor publik lainnya. Terdapat beberapa karakteristik terkait birokrasi:

1. **Hierarki:** Birokrasi umumnya melibatkan struktur hierarkis dengan tingkatan yang berbeda, dimana setiap tingkatan memiliki tanggung jawab tertentu. Ini memungkinkan pembagian kerja yang efisien dan pengambilan keputusan yang terkoordinasi.
2. **Spesialisasi:** Dalam birokrasi, pekerjaan dibagi menjadi tugas-tugas yang spesifik dan berorientasi pada fungsi. Setiap individu atau unit bertanggung jawab atas tugas tertentu, yang memungkinkan mereka untuk menjadi ahli di bidangnya.
3. **Standarisasi:** Birokrasi melibatkan pembuatan aturan, prosedur, dan pedoman standar untuk mengatur tindakan dan keputusan. Standarisasi ini dapat membantu dalam menjaga konsistensi dan efisiensi.
4. **Impersonalitas:** Birokrasi cenderung bersifat impersonal, artinya keputusan diinteraksidianggap berdasarkan peraturan dan prosedur daripada hubungan pribadi atau preferensi individu.
5. **Efisiensi:** Salah satu tujuan utama birokrasi adalah mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan pelaksanaan tugas. Ini bisa dicapai melalui standarisasi, spesialisasi, dan pemantauan kinerja.

2.4 Penataan Ulang System Birokrasi

Ada banyak penjelasan yang bisa digunakan untuk memahami mengapa pemerintah dan birokrasi gagal mengembangkan kinerja pelayanan yang baik. Kemampuan dari suatu sistem pelayanan publik dalam merespon dinamika yang terjadi dalam masyarakatnya secara tepat dan cepat serta efisien akan sangat ditentukan oleh bagaimana misi birokrasi dapat dipahami dan dijadikan sebagai basis kriteria dalam pengambilan kebijakan oleh birokrasi itu. Ketidakjelasan misi juga membuat orientasi birokrasi dan pejabatnya pada prosedur dan peraturan menjadi amat tinggi. Apalagi dalam birokrasi publik Indonesia yang cenderung menjadikan prosedur dan peraturan sebagai panglima. Akibatnya ketidakjelasan misi birokrasi publik mendorong para pejabat birokrasi publik menggunakan prosedur dan aturan sebagai kriteria utama dalam penyelenggaraan pelayanan. . Akibatnya para pegawai takut berbuat salah dan cenderung menyelesaikan pekerjaanpekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), walaupun keadaan yang ditemui dalam kenyataan sangat jauh berbeda dengan peraturan-peraturan teknis tersebut⁷ . Kecenderungan penelitian sejak lama telah menunjukkan bahwa untuk merujuk pada prosedur dan kurangnya kreativitas merupakan ciri umum para pegawai negeri sipil di Indonesia.

2.5 Konsep Dasar Birokrasi Untuk memahami analisis e-Government dalam efisiensi birokrasi, penting untuk memahami konsep dasar e-Government. E-Government merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah dalam penyediaan layanan publik dan interaksi dengan masyarakat. Konsep ini melibatkan penggunaan infrastruktur teknologi, aplikasi, kebijakan, dan keamanan data untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.

2.5.1 Definisi E-Government

E-Government dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi publik, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Melalui eGovernment, pemerintah dapat menyediakan layanan publik secara elektronik, mengelola data dan informasi secara efisien, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat.

2.5.2 Model E-Government

E-Government dapat dibagi menjadi beberapa model, termasuk Government-to-Citizen (G2C), Government-to-Business (G2B), dan Government-to-Government (G2G). Model G2C melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan layanan publik secara langsung. Contohnya adalah pendaftaran penduduk, pembayaran pajak, dan pengajuan permohonan izin. Model G2B melibatkan interaksi antara pemerintah dan sektor bisnis dalam memberikan layanan terkait bisnis dan regulasi. Contohnya adalah pengajuan perizinan usaha dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Model G2G melibatkan interaksi antara lembaga pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kerjasama administratif. Contohnya adalah pertukaran data antara departemen pemerintah, kolaborasi dalam pengambilan keputusan, dan koordinasi kebijakan.

2.6 Manfaat E-Government

Dalam Efisiensi Birokrasi Penerapan e-Government dapat memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan efisiensi birokrasi. Beberapa manfaat tersebut antara lain:

- A. Otomatisasi proses administrasi E-Government memungkinkan otomatisasi proses administrasi dan pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual yang lambat dan rentan terhadap kesalahan. Dengan adanya sistem elektronik, proses administrasi dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan akurat. Misalnya, penggunaan sistem basis data terintegrasi memungkinkan berbagi data antarinstansi pemerintah, sehingga menghindari duplikasi data dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
- B. Aksesibilitas informasi E-Government meningkatkan aksesibilitas informasi publik dengan menyediakan platform elektronik yang memudahkan warga dalam mendapatkan informasi pemerintahan dan layanan publik. Melalui portal e-Government, warga dapat mengakses informasi mengenai kebijakan pemerintah, prosedur layanan publik, dan data publik secara mudah dan transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa harus menghadiri kantor pemerintah secara fisik.
- C. Pengurangan birokrasi Penerapan e-Government dapat mengurangi tingkat birokrasi dengan mempercepat proses pengambilan keputusan dan mengurangi jumlah dokumen fisik yang harus diproses secara manual. Dengan adanya sistem elektronik, proses pengajuan permohonan, pengolahan dokumen, dan evaluasi dapat dilakukan secara efisien dan terotomatisasi. Hal ini dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses administrasi dan mengurangi biaya yang terkait dengan birokrasi yang berlebihan.
- D. Partisipasi publik yang lebih besar E-Government memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Melalui platform e-Government, warga dapat memberikan masukan, saran, atau

keluhan terkait kebijakan pemerintah atau layanan publik. Partisipasi publik yang lebih besar ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat

2.7 Tantangan Dalam Implementasi E-Government

Meskipun e-Government menawarkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, implementasinya juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa tantangan yang perlu diperhatikan adalah:

A. Keterbatasan akses dan infrastruktur teknologi Implementasi e-Government membutuhkan akses yang luas terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Namun, keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi yang memadai masih menjadi masalah di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan atau di negara-negara berkembang. Keterbatasan ini dapat membatasi partisipasi masyarakat dalam layanan e-Government dan mempengaruhi efektivitas implementasi.

B. Keamanan dan privasi data Penerapan e-Government juga menghadapi tantangan terkait keamanan dan privasi data. Dalam menyimpan dan mengelola data elektronik, pemerintah harus memastikan keamanan data yang sensitif dan privasi warga. Ancaman keamanan seperti peretasan atau penyalahgunaan data dapat menjadi hambatan serius dalam implementasi e-Government yang efektif.

C. Perubahan budaya dan resistensi Implementasi e-Government juga memerlukan perubahan budaya di kalangan birokrasi dan masyarakat. Penerapan teknologi baru dan perubahan proses kerja dapat menghadapi resistensi dari pihak yang terbiasa dengan cara kerja tradisional. Dibutuhkan upaya komunikasi dan pelatihan yang efektif untuk memastikan adopsi yang sukses dan dukungan dari semua pihak terkait.

2.8 Landasan Teori

IV. Landasan Teori

A. Konsep e-Government

- Definisi e-Government: E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. Melalui e-Government, pemerintah dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan partisipasi publik, dan meningkatkan efisiensi birokrasi.
- Model e-Government: Ada beberapa model e-Government, seperti Government-to-Citizen (G2C), Government-to-Business (G2B), dan Government-to-Government (G2G). Model G2C melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, G2B melibatkan interaksi dengan sektor bisnis, dan G2G melibatkan interaksi antara lembaga pemerintah

B. Efisiensi Birokrasi

- Definisi efisiensi birokrasi: Efisiensi birokrasi merujuk pada kemampuan suatu sistem birokrasi untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Efisiensi dapat diukur dari segi waktu, biaya, dan kualitas hasil kerja.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi birokrasi: Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi birokrasi antara lain struktur organisasi yang efektif, proses kerja yang terstandarisasi, kompetensi pegawai, penggunaan teknologi yang tepat, dan adanya mekanisme pengukuran kinerja.

B. Hubungan antara e-Government dan Efisiensi Birokrasi

- E-Government sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi birokrasi: Implementasi e-Government dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan aksesibilitas informasi. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan publik, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat pengambilan keputusan.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas e-Government dalam meningkatkan efisiensi birokrasi: Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas e-

Government dalam meningkatkan efisiensi birokrasi adalah ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, keterampilan pegawai dalam menggunakan teknologi, dukungan kebijakan yang kuat, keamanan data yang terjamin, dan partisipasi aktif dari Masyarakat.

2.9 Kerangka Pikir

- Identifikasi masalah: Efisiensi birokrasi masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara. Proses administrasi yang lambat, birokrasi yang berlebihan, dan kurangnya aksesibilitas informasi dapat menghambat efisiensi birokrasi.

- Tujuan penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi e-Government dalam meningkatkan efisiensi birokrasi. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas e-Government dalam meningkatkan efisiensi birokrasi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi e-Government.

- Variabel penelitian: Variabel independen: Implementasi e-Government (termasuk kebijakan, infrastruktur teknologi, keterampilan pegawai, dan keamanan data). Variabel dependen: Efisiensi birokrasi (termasuk waktu proses administrasi, biaya, dan kualitas pelayanan publik). Kerangka konseptual: Kerangka konseptual penelitian ini akan menggambarkan hubungan antara implementasi e-Government dan efisiensi birokrasi. Kerangka ini akan memperlihatkan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas e-Government dapat meningkatkan efisiensi birokrasi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini berfungsi Untuk memastikan bahwa penelitian yang kita lakukan berjalan dengan baik, efektif, dan sistematis seperti yang diharapkan, metode penelitian ini adalah urutan tindakan. Pertama, peneliti memikirkan pilihan Data apa yang dikumpulkan dan dari sumber mana data itu kemudian disaring.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian ini karena metode ini dapat memberikan penjelasan menyeluruh tentang tulisan, ucapan, dan tingkah laku yang diamati peneliti. Menurut **Bogdan & Biklen, s (1992: 21)** mengemukakan pendapat bahwa penelitian kualitatif adalah langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang yang diamati. Penelitian ini bertujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan. Kualitatif menurut **Moloeng, (2007: 6)** menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Metode kualitatif adalah salah satu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena manusia dan sosial secara mendalam. Metode ini berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data non-numerik, seperti teks, gambar, audio, dan video, untuk mengungkapkan makna, pola, dan konsep yang mendasari fenomena yang diteliti.

Metode kualitatif sering digunakan dalam ilmu sosial, antropologi, psikologi, ilmu politik, dan bidang-bidang lain yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang manusia dan masyarakat. Metode kualitatif memiliki kelebihan dalam memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena sosial dan budaya, tetapi juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti subjektivitas peneliti dan sulitnya menggeneralisasi temuan ke populasi yang lebih besar. Oleh karena itu, metode ini sering digunakan bersama dengan metode kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu masalah penelitian. Melihat, memandang, mendeskripsikan, dan merumuskan adalah tujuan dari pendekatan deskriptif, dan alasan mengapa pendekatan kualitatif ini dipilih untuk melakukan penelitian ini. berdasarkan tujuan penelitian sehingga peneliti pada akhirnya dapat memperoleh pemahaman yang terkait analisis e-government terhadap efisiensi birokrasi di Indonesia.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah kumpulan susunan masalah yang disebut sebagai pusat atau pokok pembahasan topik penelitian. Tujuan dari penetapan fokus penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa penelitian memiliki fokus yang tepat untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian juga dapat digunakan sebagai pusat konsentrasi dari tujuan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Menurut **Sugiyono (2012)** Sugiyono berpendapat bahwa fokus penelitian merupakan salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif adalah bahwa gejala dari suatu objek itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (aktor, dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Yang menjadi focus penelitian adalah :

1. Evaluasi Dampak Sosial dan Ekonomi: Mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari implementasi e-Government dalam hal peningkatan efisiensi birokrasi.
2. Implementasi e-Government: Analisis tentang bagaimana pemerintah mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek birokrasi, seperti pengadaan barang dan jasa, administrasi pajak, layanan publik online, dan sebagainya.

3.3 Lokasi Penelitian

Menurut Hamid Darmadi (2011:52) lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Menurut Wiratna Sujarweni (2014:73) Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Suwarma Al Muchtar, 2015: 243). Menurut Nasution (2003: 43) mengatakan bahwa lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi.

3.4 Jenis dan Sumber Penelitian

a. Jenis Data

Data merupakan berbagai informasi yang dikumpulkan untuk mendukung sebuah penelitian. Sebuah data harus diolah kembali untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, sebagai berikut:

a) Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh dari peninjauan langsung di lapangan pada objek penelitian, data tersebut diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak-pihak yang berkompeten yang akan di proses untuk tujuan penelitian.

b) Data Sekunder Data Sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lain yang terdiri dari laporan, catatan, dokumen, dan studi pustaka yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif melibatkan berbagai teknik yang dirancang untuk mengumpulkan informasi yang bersifat deskriptif dan non-angka. Teknik ini digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami fenomena sosial dengan lebih mendalam dan kontekstual. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yang umum digunakan:

1. Wawancara: Wawancara adalah teknik yang paling umum dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan pertemuan dengan responden untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka. Wawancara bisa bersifat terstruktur (dengan pertanyaan tertentu) atau tidak terstruktur (lebih bebas).
2. Observasi: Observasi melibatkan pengamatan langsung dan dokumentasi tentang perilaku, interaksi, atau kejadian dalam konteks yang relevan. Observasi dapat dilakukan dalam situasi yang alami (observasi lapangan) atau dalam pengaturan yang diatur (observasi terkontrol).

3.6 Teknis Analisi Data

Analisis data kualitatif adalah proses untuk memahami data non-angka yang diperoleh melalui wawancara, observasi, atau analisis teks. Langkah-langkah umum dalam analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, pengodean, kategorisasi, analisis tematis, interpretasi, validasi, dan pelaporan. Penting untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam data dan menghubungkan temuan dengan kerangka kerja atau teori yang relevan. Validasi adalah langkah penting untuk memastikan keandalan dan validitas hasil analisis. Analisis data kualitatif digunakan dalam berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konsep dan pengalaman manusia.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Mengidentifikasi dan memastikan keabsahan data adalah langkah penting dalam proses penelitian. Ini melibatkan desain penelitian yang baik, pemilihan alat ukur yang tepat, pengumpulan data yang hati-hati, dan analisis yang akurat. Memahami dan mengatasi ancaman terhadap keabsahan data membantu memastikan bahwa hasil penelitian atau analisis data dapat diandalkan dan berguna.

1. Editing Data

Editing data adalah proses penting dalam manajemen data yang melibatkan identifikasi dan koreksi kesalahan, validasi data, memastikan konsistensi data, pembersihan data, integrasi data, dokumentasi perubahan, verifikasi data, keamanan data, dan validasi kembali. Tujuannya adalah memastikan bahwa data akurat, lengkap, dan sesuai dengan tujuan analisis atau keperluan yang diinginkan. Proses ini mendukung pengambilan keputusan yang berkualitas dan hasil penelitian yang valid.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi E-Government di Indonesia telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi birokrasi. Beberapa dampak positif tersebut mencakup peningkatan aksesibilitas dan pelayanan, otomatisasi proses, penggunaan data berbasis fakta, pengurangan biaya administrasi, transparansi dan akuntabilitas, koordinasi antar instansi, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Meskipun tantangan seperti perlindungan data pribadi, literasi digital, keamanan siber, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi masih ada, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan infrastruktur, keamanan, pelatihan, dan koordinasi untuk mencapai efisiensi yang maksimal dalam birokrasi.

Implementasi E-Government di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya literasi digital di masyarakat, ancaman keamanan siber, kebutuhan untuk memperkuat perlindungan data pribadi, biaya tinggi dalam implementasi, ketergantungan pada penyedia teknologi asing, resistensi dari birokrasi, masalah kepatuhan hukum, dan tingkat partisipasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan. Perlu juga pengembangan regulasi yang kuat, investasi dalam infrastruktur teknologi, pelatihan untuk meningkatkan literasi digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat E-Government. Dengan upaya bersama, implementasi E-Government di Indonesia dapat menjadi lebih efisien dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pemerintah.

Implementasi E-Government di Indonesia telah melibatkan serangkaian langkah dan strategi untuk menghadapi berbagai kendala yang mungkin timbul. Ini termasuk investasi dalam pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan literasi digital, perlindungan data pribadi, peningkatan keamanan siber, kolaborasi antar instansi pemerintah, pemeliharaan dan pembaruan sistem, pemantauan kinerja, partisipasi masyarakat, dan kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga akademis. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta merupakan kunci keberhasilan implementasi E-Government di Indonesia. Peran penting E-Government dalam mendukung upaya menciptakan clean and good governance di Indonesia. Ini mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, pengurangan korupsi, kemudahan akses pelayanan, akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, percepatan proses birokrasi, manajemen

sumber daya manusia yang lebih efisien, dan peningkatan kualitas layanan publik. Namun, perlu juga diperhatikan aspek keamanan data, perlindungan privasi, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi agar implementasi E-Government berjalan sukses.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

implementasi E-Government memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi birokrasi. E-Government telah meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan, mengotomatisasi proses, memungkinkan penggunaan data berbasis fakta, mengurangi biaya administrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memfasilitasi koordinasi antar instansi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meskipun tantangan seperti perlindungan data pribadi, literasi digital, keamanan siber, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi masih ada, pemerintah harus terus meningkatkan upaya dalam pengembangan dan implementasi E-Government untuk mencapai efisiensi maksimal dalam birokrasi. Keseluruhan, E-Government telah membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia.

Implementasi E-Government di Indonesia telah membawa perubahan positif dalam cara birokrasi beroperasi. Dengan meningkatnya aksesibilitas, otomatisasi proses, penggunaan data berbasis fakta, dan peningkatan transparansi, birokrasi menjadi lebih efisien dan akuntabel. Dalam hal ini, E-Government telah membantu mengurangi biaya administrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Namun, ada tantangan yang perlu diatasi, seperti perlindungan data pribadi, literasi digital, keamanan siber, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi. Untuk mencapai efisiensi maksimal dalam birokrasi, pemerintah harus terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi kendala ini. Secara keseluruhan, E-Government memiliki potensi besar untuk mengubah tata kelola pemerintahan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pemerintah, dan sektor bisnis.

SARAN

saran yang dapat membantu meningkatkan pengaruh positif E-Government terhadap birokrasi di Indonesia. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, pemerintah dapat memperkuat E-Government dan menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan komitmen kuat, kerja sama lintas sektor, dan perhatian pada aspek keamanan dan privasi, E-Government memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Rohman, A., & Trihardianto, W. T. (2019). Reformasi Birokrasi dan Good Governance (pp. 1-147). Intrans Publishing.
- Rosyid, M. (n.d.). REPRESENTASI WEBSITE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI DAN LAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA EGOVERNMENT.
- Siti Marwiyah, S. H., Sedarmayanti, M. P., Fedianty Augustinah, M. M., Teni Listiani, M. M., Jubaedah, E., & Kushendar, D. H. (2023). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Di Era Digital. Deepublish.
- Fang, Z. (2002). E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development. In The Internet and Management (Vol. 10, Issue 2).
- Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 25-37.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. Journal of Governance and Social Policy, 1(1), 24-34
- Taufik, T., & Warsono, H. (2020). Birokrasi baru untuk new normal: tinjauan model perubahan birokrasi dalam pelayanan publik di era Covid-19. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(1), 1-18.
- riawan, H., & Rijal, R. (2019). REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus UPTB Samsat Kabupaten Biak Numfor). Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 5(2), 128-141.
- LUMBANRAJA, Anggita Doramia. Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2020, 3.2: 220-231.
- SUWIDYANTI, Nely. PERAN GOOD GOVERNANCE MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN E-GOVERMENT GUNA MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN BERBASIS KINERJA DI KOTA SURABAYA. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 2023, 10.2: 530-543.

HERIYANTO, Heriyanto. Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik. *Musamus Journal of Public Administration*, 2022, 4.2: 066-075.

SUMARDI, Sumardi; NAWIR, Adi; MUKHLIS, Suardi. Analisis Transformasi Birokrasi Melalui Pengembangan e-Government di Indonesia. *Journal of Government Insight*, 2021, 1.2: 84-91.

MASYHUR, Firdaus. Implementasi Strategi E-Government Kota Parepare Menggunakan Model Cassidy Dan Dimensi Pemeringkatan E-Government Indonesia (Pegi). *J. Penelit. Komun. dan Opini Publik*, 2016, 20.2: 111-122.

Kurniasih D. Interaksi Sosial dalam Implementasi e-Government. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*. 2013 Jun 15;2.

Jaya S. Implementasi Dan Perkembangan E-Government di Indonesia. *Jurnal Informatika Multimedia (JIM)*. 2013;2(1):37-52.

Irawan B. Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Paradigma (JP)*. 2017 Jul 5;2(1):174-201.

Putra RE. E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*. 2009 Apr 1;8(1).

AZIZ, Said Abdul. Implementasi Kebijakan Pengembangan E-Government. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2016, 7.1.

NUGROHO, Trisapto Wahyudi Agung. Analisis e-government terhadap pelayanan publik di kementerian hukum dan HAM (analysis of e-government to public services in the ministry of law and human rights). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2017, 10.3: 279-296.